

SKRIPSI
TINJAUAN VIKTIMOLOGIS PUNGUTAN LIAR OLEH OKNUM
KEPOLISIAN TERHADAP PENGEMUDI ANGKUTAN KOTA
ANTAR DAERAH DI KABUPATEN SINJAI



OLEH
NURHIDAYAH TAHA
B 111 10 038

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Pada Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2014

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS PUNGUTAN LIAR OLEH OKNUM
KEPOLISIAN TERHADAP PENGEMUDI ANGKUTAN KOTA ANTAR
DAERAH DI KABUPATEN SINJAI**

OLEH:

NURHIDAYAH TAHA

B 111 10 038

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Pada Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2014

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN VIKTIMOLOGIS PUNGUTAN LIAR OLEH OKNUM KEPOLISIAN TERHADAP PENGEMUDI ANGKUTAN KOTA ANTAR DAERAH DI KABUPATEN SINJAI

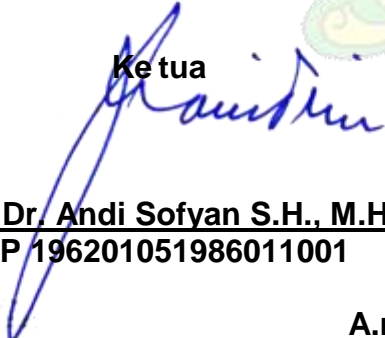
Disusun dan diajukan oleh

**NURHIDAYAH TAHA
B 111 10 038**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Kamis Tanggal 20 Februari 2014
Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

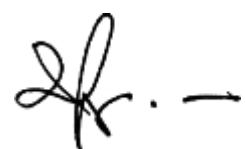
Ketua


Prof Dr. Andi Sofyan S.H., M.H
NIP 196201051986011001

Sekretaris


Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H
NIP 1967903262008122002

**A.n. Dekan
Wakil Dekan Akademik**


Prof. DR. Ir. Abrar Saleng S.H., M.H.
NIP. 19630419 1989031 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan Bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : NURHIDAYAH TAHA

Nomor Induk : B 111 10 038

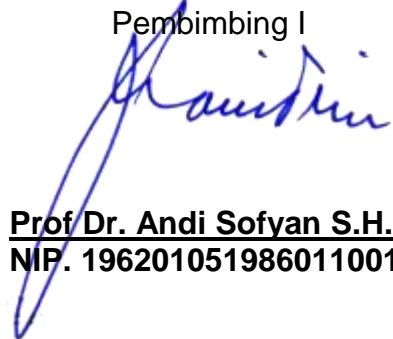
Bagian : Hukum Pidana

**Judul Skripsi : Tinjauan Viktimologis Pungutan Liar oleh Oknum
Kepolisian terhadap Pengemudi Angkutan Kota
Antar Daerah di Kabupaten Sinjai.**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 7 Januari 2014

Pembimbing I



Prof Dr. Andi Sofyan S.H., M.H
NIP. 196201051986011001

Pembimbing II



Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H
NIP. 197903262008122002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : NURHIDAYAH TAHA

Nomor Induk : B 111 10 038

Bagian : Hukum Pidana

**Judul Skripsi : Tinjauan Viktimologis Pungutan Liar oleh Oknum
Kepolisian terhadap Pengemudi Angkutan Kota
Antar Daerah di Kabupaten Sinjai**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Makassar, 7 Januari 2014

An. Dekan



Prof. Dr.Ir. Abrar Saleng S.H.,M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

Nurhidayah Taha (B 111 10 038), **“Tinjauan Viktimologis Pungutan Liar oleh Oknum Kepolisian terhadap Pengemudi Angkutan Kota Antar Daerah di Kabupaten Sinjai”**. Dibimbing oleh Prof Dr. Andi Sofyan S.H., M.H Selaku pembimbing I dan Ibu Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H Selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kontribusi retribusi para pengemudi angkutan kota yang berada di terminal. Suatu jenis retribusi yang memiliki potensi cukup tinggi untuk ditingkatkan penerimaannya, namun pada kenyataannya, kontribusi penerimaan retribusi kurang maksimal. Penelitian ini dilakukan di terminal kabupaten sinjai dan beberapa tempat yang berkaitan dengan judul skripsi. Tujuannya adalah untuk mengetahui peran pengemudi angkutan kota sehingga menjadi korban pungutan liar (pungli) serta mengkaji bagaimana cara penanggulangan korban agar tidak lagi menjadi korban pungli yang tentunya berlandaskan pada undang-undang yang terkait dengan judul skripsi.

Sumber data yang penulis gunakan yaitu bersumber dari data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan salah satu karyawan Dinas perhubungan, para korban, dan salah satu anggota kepolisian serta data dan dokumen yang diperoleh melalui instansi atau lembaga tempat penelitian, media elektronik, karya ilmiah, dan dokumen yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara dan studi dokumen yang merupakan sebuah rujukan untuk menganalisis hasil peneltian yang ada untuk menghasilkan kesimpulan dan saran.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu: 1) Peran korban dalam terjadinya pungutan liar terlihat dari adanya ketakutan dan munculnya rasa agar urusan cepat selesai yang sering kali disebut sebagai “uang Pelicin” sebagai instrument dalam merumuskan masalah. Serta supir sebagai korban malah menghendaki efisiensi waktu dan biaya. 2) Upaya penanggulangan pengemudi angkutan kota agar tidak lagi menjadi korban pungli adalah dengan cara pembinaan yang efektif yang disertai dengan pengawasan berjalan, pengemudi angkutan kota agar lebih memperhatikan kelengkapan kendaraan serta mematuhi aturan lalu lintas yang ada agar terhindar dari perbuatan yang bisa merugikan diri sendiri dan anggota kepolisian pun tidak mendapat celah dalam mendapatkan keuntungan pada saat melaksanakan tugas, sehingga tercipta suatu penegakan hukum yang lebih baik dari sebelumnya, karena sebuah perubahan tentunya menginginkan keadaan yang jauh lebih baik.

Kata Kunci : Viktimologis, Pungutan Liar, Pengemudi.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunianya yang senantiasa memberi petunjuk dan membimbing langkah penulis sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan yang seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu kritikan dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda tercinta Muh. Tahang sakka s.ag dan Ibunda tersayang Sitti Hafsah Musa yang sangat menyayangi penulis. Segala pengorbanan yang beliau berikan kepada penulis, limpahan kasih sayang yang mereka curahkan dan rela banting tulang demi memenuhi segala kebutuhan penulis baik berupa materi maupun inmateri sejak penulis lahir hingga penulis menempuh detik-detik terakhir dalam menyelesaikan studi hingga saat ini. Serta kakak-kakakku tersayang Syamsumarlin Taha

S.Pd. M.Pd, Malkam Taha S.Ip. Subhan Taha S.Sos, Darmawan sari S.Kep Ners Dan adik-adik tercinta Ilham Taha dan Ramlan Taha, dimana mereka selalu memberikan dukungan yang tidak ternilai harganya. Begitu banyak jasa mereka yang penulis tidak mampu untuk membalasnya selain ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa bimbingan, motivasi dan saran selama menjalani pendidikan di fakultas hukum universitas hasanuddin dan selama proses penulisan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof Dr. Andi Sofyan S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing I.
3. Ibu Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa memberikan saran dan masukan kepada penulis selama penyusunan ini dimulai dari penyusunan proposal sampai dengan penyusunan skripsi.
4. Dan Bapak Prof Dr. Aswanto S.H., M.S., DFM. Prof Dr. Muhadar S.H., M.H. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. Selaku Penguji yang telah memberikan saran serta masukan-masukan yang sangat baik selama penyusunan skripsi penulis.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Buat Sahabatku Tary, Donita, indha, lisa, nashranda, devy, aii, ujha, ayhu, alimuddin, irfan, yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat baik kepada penulis.
7. Buat alumni Fakultas hukum universitas hasanuddin Makassar, kak adjie Lorhit, kak agung, kak adam, kak akbar, kak kiki', kak ocha, yang selalu memberikan semangat dan motivasi hingga karya ini selesai.
8. Buat teman-teman terdekatku, ifha, ephy'e', Rina , nana, mumu, fitry, yang selalu memberikan semangat saat di Pondok Mario (kost).
9. Buat saudara-saudara yang akrab, kak nazar, kak echa', Kak arpan, chaly, kak tyo, kak wahyu, kerupuk, chya, norma, kak david, kak anto. Adik lana dan adik thyas
10. Buat teman-teman stusoc yang selalu kurindukan, ifha, dian, ana, uny,wawan, yudis, kamal, asrul, abang, uggu',indha, efhy.dll.
11. Buat Anak-anak IKMS dan Alsa, terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya. Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung.

Akhirnya teriring doa, semoga segala bantuan dan apa yang telah bapak/ibu/saudara(i) serta rekan-rekan lakukan dapat bernilai amal jariyah

disisi Allah SWT. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, terutama kepada penulis sendiri. Amin.

Makassar, 7 Januari 2014

Penulis

NURHIDAYAH TAHA

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENYERTAAN KEASLIAN TULISAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Viktimologi	6
1. Sejarah Perkembangan Viktimologi	6
2. Pengertian Viktimologi	7
3. Manfaat Viktimologi	11
4. Ruang Lingkup Viktimologi	12
5. Hubungan Kriminologi dan Viktimologi.....	12
6. Upaya-Upaya Penanggulangan Kejahatan	14

B. Korban	17
1. Pengertian Korban	17
2. Tipologi Korban Kejahatan.....	19
3. Jenis-jenis Korban Dalam Viktimologi	21
C. Pungutan Liar	21
1. Defenisi Pungutan Liar	21
2. Dampak Pungutan Liar di Masyarakat	22
D. Kepolisian	24
1. Defenisi Kepolisian	24
2. Fungsi Kepolisian	25
3. Tugas dan Wewenang Aparat Kepolisian	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Lokasi Penelitian.....	31
B. Jenis dan Sumber Data	31
C. Analisa Data	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Peran Pengemudi Angkutan Kota Sehingga Menyebabkannya Menjadi Korban Pungutan Liar Oleh Oknum Kepolisian	33
1. Pembagian Pungutan Liar	33
2. Jenis Pungutan Liar	35
3. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pungutan Liar	39
B. Upaya Penanggulangan Terhadap Pengemudi Angkutan Kota Agar Tidak Lagi Menjadi Korban Pungutan Liar	49
1. Upaya Penanggulangan Pungutan Liar	49
2. Upaya yang harus dilakukan Oleh Pemerintah Khususnya Pengemudi Angkutan Kota Agar Terlepas Dari Pungli	52

BAB V PENUTUP	54
----------------------------	-----------

A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi adalah perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat pengangkutan. Kelancaran proses transportasi dipengaruhi oleh kondisi ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang pada dasarnya transportasi merupakan suatu tolak ukur interaksi keruangan antar wilayah dan sangat penting peranannya dalam menunjang proses perkembangan suatu wilayah. Selain itu, transportasi juga berperan menunjang keberhasilan pembangunan terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian di masyarakat, tak terkecuali di daerah, dengan dibangunnya sarana transportasi, kegiatan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat khususnya dalam pembangunan di suatu daerah pada kawasan yang memiliki potensi ekonomi tinggi akan lebih mudah dikembangkan. Kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan ini akan berkembang apabila memiliki prasarana yang baik dan inovasi teknologi.

Sarana dan prasarana transportasi memiliki beberapa dampak yang secara langsung maupun tidak langsung dalam masyarakat, dimana perubahan yang terjadi sebagai akibat lebih jauh dari pelaksanaan dan penerimaan ketersediaan serta lancarnya sarana dan prasarana transportasi menghapuskan perisolasian suatu daerah serta aksesibilitas pun semakin meningkat. Peningkatan ini membuka suatu peradaban baru, sehingga

kemajuan dan modernisasi yang berasal dari daerah pusat pemerintahan dapat dengan mudah masuk. Hal ini dapat dilihat dari segi ekonomi, yang mana dengan lancarnya sarana transportasi pemasaran hasil usaha pun semakin mudah seperti seperti halnya pengemudi angkutan kota.

Pengemudi angkutan kota sebagai pelaksana transportasi telah melaksanakan tugas dan hak kewajibannya dengan baik. Akan tetapi tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan aparat kepolisian. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar (Pungli).¹

Pada awalnya, tindakan dari masyarakat lebih banyak karena keterpaksaan, yaitu sebagai bentuk respon mereka terhadap kerumitan, pemaksaan dan ketidak pastian pelayanan publik. Namun, apabila pada perkembangannya masyarakat pengguna layanan justru banyak yang merasa lega ketika melakukan hal itu, atau bahkan mengharapkan pungli terjadi karena beranggapan hal itu dapat mempercepat urusan, dan tidak menganggap sebagai praktik negatif yang merugikan, berarti masyarakat telah ikut melembagakan pungli.

¹ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2002 Hal: 6

Dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak selalu sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan Perundang-undangan utamanya pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Dengan perkembangan zaman yang semakin pesat membuat banyak pergeseran dalam sistem sosial dalam masyarakat. Salah satu perubahan ekonomi yang semakin memburuk akibat dampak dari krisis global yang melanda hampir diseluruh bagian dunia, tidak terkecuali di daerah, khususnya di Kabupaten Sinjai.

Dengan tingginya tekanan ekonomi yang menuntut setiap orang untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka dalam melaksanakan usaha guna memenuhi kebutuhan individu harus melakukan interaksi diantara anggota masyarakat lainnya, salah satu lembaga penegak hukum seperti kepolisian yang ingin dapat bekerja efektif, membutuhkan legitimasi dari masyarakat di mana ia bekerja dengan kata lain, kepolisian perlu membangun dan menjaga citra di masyarakat tetapi fakta yang ada anggota kepolisian yang merusak citranya sendiri dengan melakukan tindakan pungli.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran pengemudi angkutan kota sehingga menyebabkannya menjadi korban pungutan liar oleh oknum kepolisian (Studi kasus kabupaten sinjai tahun 2013) ?

2. Bagaimanakah upaya penanggulangan agar pengemudi angkutan kota tidak menjadi korban pungutan liar ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui peranan pengemudi sehingga menjadi korban pungutan liar.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan pengemudi angkutan kota agar tidak menjadi korban pungutan liar.

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana yang sangat berarti bagi penulis.
- b. Untuk memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar kiranya dapat memberikan sumbangsi pikiran untuk menemukan pemikiran-pemikiran baru dalam bidang ilmu hukum. Selain itu memberikan sumbangan pemikiran di kalangan akademisi dan para pembaca pada umumnya yang terkait dengan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum kepolisian terhadap pengemudi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi kalangan praktisi hukum demi menciptakan penegakan hukum yang lebih baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Viktimologi

1. Sejarah Perkembangan Viktimologi

Pada awal perkembangannya, viktimologi baru mendapat perhatian dari kalangan ilmuwan dimulai pada saat Hans Von Hentig pada Tahun 1941 menulis sebuah makalah yang berjudul "*Remark on the interaction of perpetrator and victim.*" Tujuh tahun & terbitlah buku yang berjudul *The Kriminal and his victim* yang menyatakan bahwa korban mempunyai peranan yang menentukan dalam timbulnya kejahatan.²

Pada Tahun 1947 atau setahun sebelum buku von Hentig terbit, Mendelsohn menulis sebuah makalah dengan judul "*New bio-psycho-sosial horizons: Victimology.*" Pada saat inilah istilah *victimology* pertama kali digunakan. Setelah itu para sarjana-sarjana lain mulai melakukan studi tentang hubungan psikologis antara penjahat dengan korban, bersama H. Mainheim, Schafser, dan Fiseler. Setelah itu pada Tahun 1949 W.H. Nagel juga melakukan pengamatan mengenai viktimologi yang dituangkan dalam tulisannya dengan judul "*de Kriminaliteit van Oss, Gronigen.*", dan pada Tahun 1959 P.Cornil dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa si korban patut mendapatkan perhatian yang lebih besar dari kriminologi dan

² <http://shecyndi.blogspot.com/2012/03/victimology.html>, diakses pada tanggal 11 September 2013 pk. 15.00 wita

viktimologi. Pada Tahun 1977 didirikanlah World Society of *Victimology*. World Society of *Victimology* (WSV) dipelopori oleh Schneider dan Drapkin. Perubahan terbesar dari perkembangan pembentukan prinsip-prinsip dasar tentang perlindungan korban terwujud pada saat diadakannya kongres di Milan, pada tanggal 26 Agustus 1985 yang menghasilkan beberapa prinsip dasar tentang korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan yang selanjutnya diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 11 Desember 1985 dalam suatu deklarasi yang dinamakan *Decleration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse Power*.³

2. Pengertian Viktimologi

Viktimologi, berasal dari bahasa latin "*victim*" yang berarti korban dan "*logos*" yang berarti ilmu. Secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.⁴

Viktimologi merupakan calon ilmu yang masih muda usianya dibandingkan dengan cabang ilmu lain seperti kriminologi dan sosiologi. Namun demikian dalam perkembangan hukum khususnya dalam rangka penegakan hukum pidana, maka peranan daripada viktimologi tidak lagi bisa disepelekan. Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/ studi yang

³ <http://lawofpardomuan.blogspot.com/2011/12/viktimologi.html>, diakses pada tanggal 12 September 2013 pk1 13.00 wita

⁴ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo ,Jakarta, 1993 hal: 40

mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.

Pada dasarnya, perkembangan ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan (viktimologi), tidak dapat dipisahkan dari lahirnya pemikiran-pemikiran brilian dari *Hans von Hentig*, seorang ahli kriminologi pada tahun 1941 serta Mendelsohn, pada tahun 1947. Pemikiran kedua ahli ini sangat mempengaruhi setiap fase perkembangan viktimologi. Hingga pada keadaan seperti sekarang tentunya tidak terjadi dengan sendirinya, namun telah mengalami berbagai perkembangan yang dapat dibagi ke dalam tiga fase. Pada tahap pertama, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja, pada fase ini dikatakan sebagai “*penal or special victimology*”. Sementara itu pada fase kedua viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan, tetapi juga meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai “*general victimology*”. Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi, yaitu mengkaji permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia. Fase ini dikatakan sebagai “*new victimology*”.⁵

⁵ Made Darma Wede, *Beberapa Catatan Tentang Korban Kejahatan Korporasi, dalam Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995, hal: 200

Mengenai objek studi atau ruang lingkup viktimologi, adalah sebagai berikut :⁶

- a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik;
- b. Teori- teori etiologi vitmisasi kriminal;
- c. Para peserta terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya;
- d. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal;
- e. Respons terhadap suatu viktimisasi kriminal argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha prevensi, refresi, tindak lanjut (ganti kerugian), dan
- f. Faktor-faktor viktimogen/ kriminogen.

Ruang lingkup perhatian atau objek studi viktimologi dan kriminologi dapat dikatakan sama , yang berbeda adalah titik tolak pengamatannya dalam memahami suatu viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dari sudut pihak korban sedangkan kriminologi dari sudut pihak pelaku. Tidak ada/ timbul viktimisasi kriminal (viktimisasi) atau kejahatan (kriminalitas) tanpa adanya pihak korban dan pelaku. Masing-masing merupakan komponen-komponen suatu interaksi (mutlak) yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas.

Suatu viktimisasi antara lain dapat dirumuskan sebagai suatu penimbunan penderitaan (mental, fisik, sosial, ekonomi, moral) pada pihak tertentu dan dari kepentingan tertentu.

⁶ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, CV. Akademika Presindo, Edisi Pertama-Cetakan Kedua, Jakarta, 1989, hal: 41-43

Menurut J.E Sahetapy,⁷ viktimisasi adalah penderitaan, baik secara fisik maupun psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain. Lebih lanjut J.E.Sahetapy berpendapat mengenai paradigma viktimisasi yang meliputi :

- a. Viktimisasi politik, dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan hak-hak asasi manusia, campur tangan angkatan bersenjata diluar fungsinya, terorisme, intervensi, dan peperangan lokal atau dalam skala internasional
- b. Viktimisasi ekonomi, terutama yang terjadi karena ada kolusi antara pemerintah dan konglomerat, produksi barang-barang tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk aspek lingkungan hidup
- c. Viktimisasi keluarga, seperti perkosaan, penyiksaan, terhadap anak, istri dan menelantarkan kaum manusia lanjut atau orang tuanya sendiri
- d. Viktimisasi media, dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, malpraktek di bidang kedokteran dan lain-lain
- e. Viktimisasi yuridis, dimensi ini cukup luas, baik yang menyangkut aspek peradilan dan lembaga permasyarakatan maupun yang menyangkut dimensi diskriminasi perundang-undangan, termasuk menerapkan kekuasaan dan stigmastisasi kendatipun sudah diselesaikan aspek peradilannya.

Viktimologi dengan berbagai macam pandangannya memperluas teori-teori etiologi kriminal yang diperlukan untuk memahami eksistensi kriminalitas sebagai suatu viktimisasi yang struktural maupun non struktural secara lebih baik. Selain itu, pandangan-pandangan dalam viktimologi mendorong orang memperhatikan dan melayani setiap pihak yang dapat menjadi korban mental, fisik, dan sosial.

⁷ Muhadar, *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006. Hal: 22

3. Manfaat Viktimologi

Manfaat viktimologis menurut Arif Gosita⁸ adalah sebagai berikut :

- a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi
- b. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial. Tujuannya tidak hanya untuk menyanjung-nyanjung pihak korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini adalah sangat penting dalam rangka mengusahakan kegiatan pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi, demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi.
- c. Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau nonstruktural. Tujuannya untuk memberikan pengertian yang baik dan agar menjadi lebih waspada
- d. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung misalnya, efek politik pada penduduk “dunia ketiga” akibat penyuapan oleh suatu korporasi internasional, akibat-akibat sosial pada setiap orang, akibat polusi industri terjadinya viktimisasi ekonomi, politik dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan.
- e. Viktimologis memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal. Pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal yang mempelajari korban dari dalam proses peradilan kriminal dan merupakan studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia.

⁸ Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan* , Akademika Pressindo, 1993, Hal : 41-43

4. Ruang Lingkup Viktimologi

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam system peradilan pidana.

Selain itu, menurut Muladi viktimologi⁹ merupakan studi yang bertujuan untuk:

- a. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban
- b. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab akibat terjadinya viktimisasi
- c. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

Menurut J.E. sahetapy,¹⁰ ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh *victim* yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.

5. Hubungan Kriminologi dan Viktimologi

Adanya hubungan antara kriminologi dan viktimologi sudah tidak dapat diragukan lagi, karena dari satu sisi Kriminologi membahas secara luas mengenai pelaku dari suatu kejahatan, sedangkan viktimologi disini merupakan ilmu yang mempelajari tentang korban dari suatu kejahatan. Seperti yang dibahas dalam buku Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, karangan Dikdik M.Arief Mansur. Jika ditelaah lebih dalam, tidak berlebihan

⁹ Makalah Gatot Sugiharto, *Viktimologi yang ada di Indonesia*, Yogyakarta 2008. Hal: 12

¹⁰ Makalah Gatot Sugiharto, *Viktimologi yang ada di Indonesia*, Yogyakarta 2008. Hal: 18

apabila dikatakan bahwa viktimologi merupakan bagian yang hilang dari kriminologi atau dengan kalimat lain, viktimologi akan membahas bagian-bagian yang tidak tercakup dalam kajian kriminologi. Banyak dikatakan bahwa viktimologi lahir karena munculnya desakan perlunya masalah korban dibahas secara tersendiri.

Khusus mengenai hubungan antara kriminologi dan hukum pidana dikatakan bahwa keduanya merupakan pasangan atau dwi tunggal yang saling melengkapi karena orang akan mengerti dengan baik tentang penggunaan hukum terhadap penjahat maupun pengertian mengenai timbulnya kejahatan dan cara-cara pemberantasannya sehingga memudahkan penentuan adanya kejahatan dan pelaku kejahatannya. Hukum pidana hanya mempelajari delik sebagai suatu pelanggaran hukum, sedangkan untuk mempelajari bahwa delik merupakan perbuatan manusia sebagai suatu gejala sosial adalah kriminologi.¹¹

J.E Sahetapy¹² juga berpendapat bahwa kriminologi dan viktimologi merupakan sisi dari mata uang yang saling berkaitan. Perhatian akan kejahatan yang ada tidak seharusnya hanya berputar sekitar munculnya kejahatan akan tetapi juga akibat dari kejahatan, karena dari sini akan terlihat perhatian bergeser tidak hanya kepada pelaku kejahatan tetapi juga kepada posisi korban dari kejahatan itu. Hal ini juga dibahas oleh pakar hukum

¹¹<http://jantukanakbetawi.wordpress.com/2010/12/28/makalahviktimologi>, diakses pada tanggal 15 September 2013, pkl. 16.00

¹² Gatot Sugiharto, *viktimologi yang ada di Indonesia*, Yogyakarta, 2008 Hal: 33

lainnya dalam memperhatikan adanya hubungan ini, atau setidaknya perhatian atas terjadinya kejahatan tidak hanya dari satu sudut pandang, apabila ada orang menjadi korban kejahatan, jelas terjadi suatu kejahatan, atau ada korban ada kejahatan dan ada kejahatan ada korban. Jadi kalau ingin menguraikan dan mencegah kejahatan harus memperhatikan dan memahami korban suatu kejahatan, akan tetapi kebiasaan orang hanya cenderung memperhatikan pihak pelaku kejahatan.

6. Upaya-Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan Kejahatan terdiri atas tiga bagian pokok yaitu :

- a. Upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai/ norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/ kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.
- b. Upaya Preventif adalah Upaya-upaya dari tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

- c. Upaya Represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/ kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

Selain dari upaya diatas, dalam usaha menekan peluang-peluang timbulnya kejahatan, terdapat tiga faktor yang berpengaruh secara timbal balik yaitu :

- a. Pemilihan pekerjaan ini ditentukan baik oleh bakat maupun oleh lingkungan. Dalam faktor lingkungan dapat diadakan pemilihan hanyalah terdapat pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dalam lingkungan tertentu.
- b. Norma-norma jabatan, terutama dalam pekerjaan yang menimbulkan kontak yang terus-menerus dan intensif antara anggota-anggota sesama pekerja sehingga mudah timbul norma-norma golongan sendiri yang kadang-kadang bertentangan dengan norma undang-undang.
- c. Kesempatan yang diberikan oleh pekerjaan, hal ini dapat berbentuk :
 - 1) Pemahaman seseorang terhadap suatu konstelasi pekerjaan akan memudahkan bagi dirinya untuk melakukan kejahatan
 - 2) Lingkungan atau keadaan tempat bekerja mempermudah orang untuk melakukan kejahatan.

Menurut Reckles, terdapat suatu cara konsepsional sehingga peluang-peluang diatas dapat diminimalkan. Hal ini dikutip oleh Soejono, sebagai berikut :

- a. Peningkatan dan pemantapan aparat dan penegak hukum meliputi pemantapan organisasi, personil, sarana dan prasarana untuk menyelesaikan perkara pidana.
- b. Perundang-undangan yang dapat berfungsi menganalisis dan membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan ke masa depan.
- c. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.
- d. Koordinasi antara aparat penegak hukum dan aparatur pemerintah lainnya yang berhubungan untuk meningkatkan daya guna dalam menanggulangi kejahatan.
- e. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kejahatan.¹³

¹³ Muhadar, Viktimisasi Kejahatan Pertanahan, Yogyakarta 2006, Hal: 34

B. Korban

1. Pengertian Korban

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban kejahatan, sebagian diantaranya sebagai berikut :¹⁴

a. Arief Gosita

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniyah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri dan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.

b. Ralph de Sola

Korban (*victim*) adalah “...*person who has injured mental or physical suffering, loss of property or death resulting from an actual or attempted kriminal offense committed by another..*”

c. Cohen

Cohen mengungkapkan bahwa korban (*victim*) adalah “*Whose pain and suffering have been neglected by the state while it spends immense resources to hunt down and punish the offender who responsible for that pain and suffering.*”

d. Z.P Zeparovic

Korban (*victim*) adalah “*the person who are threatened, injured or destroyed by an actor or omission of another (mean, structure, organization, or institution) and consequently, a victim would be anyone who has suffered from or been threatened by a punishable act (not only kriminal act but also another punishable acts as misdemeanors, economic offense, non fulfillment of work duties) or an accidents. Suffering may be caused by another man or another structure, where people are also involved.*”

¹⁴ Makalah srye mulyani, *Permasalahan yang Mengarah Pada Tindak Pidana*, Jakarta 2009. Hal: 45-47

e. Muladi

Korban (*Victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

f. Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

“Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/ atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.”

g. Undang-Undang No.27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.

h. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan pihak manapun.

i. Deklarasi PBB dalam *The Decleration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse Power 1985*.

Victims means person who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substansial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of kriminal laws operative within member states, including those laws proscribing kriminal abuse power.

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban di atas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan, lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.

2. Tipologi Korban Kejahatan

Tipologi kejahatan dimensinya dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu, ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan. Melalui kajian perspektif ini, maka Ezzat Abdel Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban :¹⁵

- a. *Nonparticipating victims* adalah mereka yang menyangkal/ menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan
- b. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
- c. *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.

¹⁵ Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung, 2003, Hal: 22

- d. *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
- e. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

Ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri maka Stephen

Schafer mengemukakan tipologi korban menjadi tujuh bentuk yaitu: ¹⁶

- a. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban.
- b. *Proactive victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
- c. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggung jawaban sepenuhnya ada pada pelaku.
- d. *Biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
- e. *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggung jawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
- f. *Self victimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggung jawaban sepenuhnya terletak pada korban sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
- g. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

¹⁶ Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Makassar, 2001, Hal: 42

3. Jenis-jenis Korban dalam Viktimologi

Lebih luas dijabarkan Abdussalam mengenai definisi dan jenis-jenis korban sebagai berikut:¹⁷

- a. Korban perseorangan, adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materil maupun non materil
- b. Korban institusi, adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.
- c. Korban lingkungan hidup, adalah setiap lingkungan alam yang di dalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami kerusakan yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggungjawab.
- d. Korban masyarakat, bangsa dan negara, adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya.

C. Pungutan Liar

1. Definisi Pungutan Liar

Di dalam dunia hukum pidana, istilah ini tidak dijumpai. Belum pernah didengar adanya tindak pidana pungli atau delik pungli. Sesungguhnya, pungli adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar (pungli). Dalam bekerjanya, pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang

¹⁷ Makalah Lina Sirajud, *Hukum An Introducing to Victimology* 2003, Hal: 67

berada dalam posisi lemah karena adanya kepentingan. Itulah sebabnya, pungli cenderung mengarah pada tindakan pemerasan yang di dalam hukum pidana merupakan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana.

Berdasarkan catatan dari dokumen perserikatan bangsa-bangsa tentang upaya pemberantasan korupsi, pungutan liar merupakan pungutan tidak resmi, permintaan, penerimaan segala pembayaran, hadiah atau keuntungan lainnya, secara langsung atau tidak langsung, oleh pejabat publik atau wakil yang dipilih dari suatu negara dari perusahaan swasta atau publik termasuk perusahaan transnasional atau individu dari negara lain yang dikaitkan dengan maksud untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tugas yang berkaitan dengan suatu transaksi komersial internasional. Perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum terdapat dalam rumusan korupsi Pasal 12 huruf e menunjuk pada Pasal 423, dan Pasal 12 huruf f, rumusannya diambil dari Pasal 425 ayat (1) KUHP.¹⁸

2. Dampak Pungutan Liar di Masyarakat

Pungutan liar semakin marak terjadi utamanya dikalangan masyarakat, karena adanya proses pembiaran, baik secara politik, hukum maupun sosial. Secara politik, suburnya pungutan liar karena tingkah laku pemerintah kota dan aparatnya. Bahkan apa yang dilakukan sekelompok orang dalam

¹⁸ Soedjono Dirjosisworo, *Fungsi Perundang-undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, , 1984, hal: 50

memungut retribusi liar karena terlegitimasi oleh tingkah laku oknum aparat. Apalagi, pemungut retribusi liar itu kadang menggunakan pakaian yang seolah-olah resmi.

Oleh karena itu, gejala pungutan liar sebenarnya ialah proses duplikasi masyarakat atas tingkah laku elit. Artinya, sekelompok masyarakat meniru praktik-praktik yang dilakukan oleh elit pemerintah. Hal ini menjadi beralasan. Sebab banyak juga retribusi atas nama pemerintah kota tetapi tidak jelas akuntabilitasnya. Meski menggunakan selembar kertas yang biasanya berwarna merah atau kuning sebagai bukti, tetap saja masyarakat bertanya-tanya. Dengan kondisi itu, masyarakat kemudian boleh menduga. Apakah uang retribusi tersebut tidak masuk ke dalam laporan penerimaan daerah. Sebab tingkah laku pemerintah kota tampaknya menjadi akar persoalan.

Padahal, sungguh keliru kalau peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) bisa menyelesaikan penerimaan pemerintah. PAD tidak akan pernah punya peranan nyata terhadap usaha memperbesar penerimaan dan pengeluaran bagi pembangunan ekonomi lokal. Malah menyebutkan dalam beberapa tahun terakhir, PAD seluruh daerah di Indonesia memang meningkat. Tapi hanya sebagian kecil yang punya signifikansi. Lebih dari itu, hanya sebagian kecil pula yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah dan kesejahteraan masyarakat, justru dampak negatif yang muncul adalah memperburuk iklim usaha, investasi dan perdagangan. Kombinasi kedua jenis pungutan baik itu resmi atau tidak resmi.

Hal ini yang tidak disadari oleh pemerintah kota. Padahal akan selalu ada imbal tukar (*trade off*) antara beban pungutan dengan iklim investasi dan perdagangan dengan usaha penguatan pertumbuhan ekonomi wilayah. Semakin banyak pungutan resmi dan atau pembiaran pungutan tidak resmi terjadi di tengah-tengah masyarakat, maka semakin besar dampak kerugian ekonomi yang diterima. Karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas bagi siapapun yang melakukan pungutan liar.

Pada dimensi sosial, gejala pungutan liar ini tampaknya telah menjadi aturan sosial yang diformalkan. Apalagi pemahaman terhadap praktik pungutan liar, pengemis dan premanisme menjadi bercampur baur. Masyarakat semakin sulit membedakan mana yang retribusi, pungutan liar, pengemis dan premanisme. Dengan kondisi ini, pungutan liar itu menjadi semacam *organized crime* yang muncul dalam bentuk pengemis yang premanistik. Maka, dengan melihat gejala ini caranya tidak lain adalah penegakan hukum yang tegas, khususnya terhadap pungutang liar.¹⁹

D. Kepolisian

1. Definisi Kepolisian

Istilah “polisi” berasal dari bahasa latin, yaitu “*politia*”, artinya tata negara, kehidupan politik, kemudian menjadi “*police*” (Inggris), “*polite*” (Belanda), “*polizei*” (Jerman) dan menjadi “polisi” (Indonesia), yaitu suatu

¹⁹ Makalah Pyandry, Pungutan Liar Terorganisasi, Jakarta, 2012 Hal: 22

badan yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan menjadi penyidik perkara kriminal .²⁰

Pada awal mulanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah bagian dari ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Namun, sejak dikeluarkannya Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, status Kepolisian Republik Indonesia sudah tidak lagi menjadi bagian dari ABRI. Hal ini dikarenakan adanya perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

2. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Fungsi kepolisian yang ada di masyarakat menjadi aman, tentram, tertib, damai dan sejahtera. Fungsi kepolisian (POLRI) terkait erat dengan *Good Governance*, yakni sebagai alat Negara yang menjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang diperoleh secara atributif melalui

²⁰ Kelana, Momo. *Hukum Kepolisian*, Gramedia Widayasarana, Jakarta, Indonesia 1994 hal: 3

ketentuan Undang-undang (Pasal 30 Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI) .

3. Tugas Dan Wewenang Aparat Kepolisian

a. Tugas Kepolisian

Tugas kepolisian dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu tugas represif dan tugas preventif. Tugas represif ini adalah mirip dengan tugas kekuasaan eksekutif, yaitu menjalankan peraturan atau perintah dari yang berkuasa apabila telah terjadi peristiwa pelanggaran hukum. Sementara tugas preventif dari kepolisian ialah menjaga dan mengawasi agar peraturan hukum tidak dilanggar oleh siapapun.

Tugas utama dari kepolisian adalah memelihara keamanan di dalam negeri. Dengan ini nampak perbedaan dari tugas tentara yang terutama menjaga pertahanan Negara yang pada hakikatnya menunjuk pada kemungkinan ada serangan dari luar Negeri. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia ditentukan sebagai berikut :

- 1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) menegakkan hukum; dan
- 3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya pada Pasal 14 dijelaskan bahwasanya dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Mengenai ketentuan-ketentuan penyelidikan dan penyidikan ini, lebih jelasnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang diantaranya menguraikan pengertian penyidikan, penyelidikan, penyidik dan penyelidik serta tugas dan wewenangnya.
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Wewenang Kepolisian

Pasal 15 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwasanya dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- 1) Menerima laporan dan/ atau pengaduan;
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan Menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) Penyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- 11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan

Perundang-undangan lainnya berwenang :

- 1) memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- 2) menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- 3) memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;

- 4) menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- 5) memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- 6) memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- 7) memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- 8) melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- 9) melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- 10) mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- 11) melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Seorang anggota polisi dituntut untuk menentukan sikap yang tegas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Apabila salah satu tidak tepat dalam menentukan atau mengambil sikap, maka tidak mustahil akan mendapat cercaan, hujatan, dan celaan dari masyarakat. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus berlandaskan pada etika moral dan hukum, bahkan menjadi komitmen dalam batin dan nurani bagi setiap insan polisi, sehingga penyelenggaraan fungsi, tugas dan wewenang kepolisian bisa bersih dan baik. Dengan demikian akan terwujud konsep *good police* sebagai prasyarat menuju *good-governance*.

Hal yang patut disayangkan saat ini ialah banyaknya polisi yang masih belum bisa menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar. Polisi yang seharusnya berfungsi sebagai pihak penegak hukum justru memanfaatkan statusnya tersebut untuk melanggar hukum, membela pihak

yang salah asalkan ada kompensasi dan menelantarkan pihak yang benar yang mestinya mendapatkan pembelaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penyusunan proposal ini akan didahului dengan suatu penelitian awal. Maka dengan itu penulis mengadakan penelitian awal berupa mengumpulkan data yang menunjang masalah yang diteliti. Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di 2 terminal yang ada di kabupaten Sinjai diantaranya Terminal Pasar Sentral Sinjai dan Terminal Bongki terhadap sopir atau pengemudi angkutan umum antar kota di wilayah Kabupaten Sinjai

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang akan digunakan adalah:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian yaitu di Terminal Pasar Sentral dan Bongki di wilayah kota Sinjai yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada narasumber.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) baik dengan teknik pengumpulan dan inventarisasi buku-buku, karya-karya ilmiah, artikel-artikel dari internet serta dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini.

C. Analisis Data

Seluruh data yang dikumpulkan oleh penulis, selanjutnya diklasifikasi dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dari bahan-bahan yang didapatkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kesimpulan-kesimpulan tersebut dari berbagai macam bahan yang telah dianalisis digunakan untuk mengkaji dan membahas permasalahan yang diteliti oleh penulis pada penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh pembahasan dan kesimpulan yang relevan, tepat serta sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pengemudi Angkutan Kota Sehingga Menyebabkannya Menjadi Korban Pungutan Liar Oleh Oknum Kepolisian

Dalam setiap manajemen, terdapat fungsi-fungsi yang menunjang terimplementasikannya sebuah kebijakan dengan baik, salah satu komponen yang terpenting adalah pengawasan (*controlling*). Pengawasan merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, termasuk dalam pengoperasian kegiatan para pengendara transportasi utamanya pengemudi angkutan kota yang ada di terminal. Secara sederhana, pengawasan berarti proses pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, akan tetapi Jika fungsi pengawasan berjalan dengan tidak optimal, maka terjadinya pelanggaran akan memperluas kesempatan untuk melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Maka guna efektivitas pengawasan tersebut perlu adanya keseimbangan antara strategi mawas keluar (*outward looking strategy*) dan strategi mawas kedalam (*inward looking strategy*).

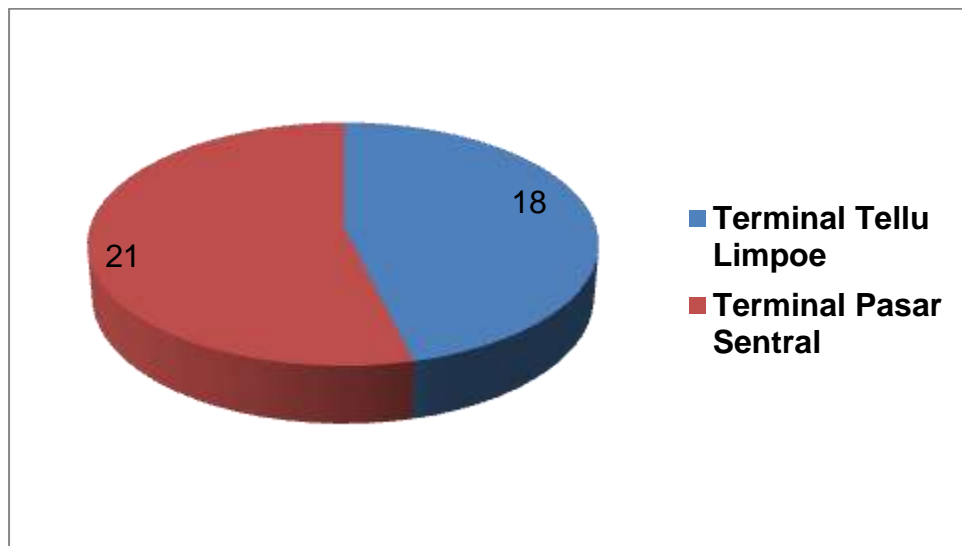
1. Pembagian Pungutan Liar

Sebelum penulis membahas mengenai peran pengemudi angkutan kota sehingga menyebabkannya menjadi korban pungli, penulis terlebih

dahulu akan menguraikan data mengenai subjek dari penelitian ini yaitu sopir angkutan kota yang sering menempati stasiun terminal yang ada di kabupaten sinjai yaitu pada terminal Pasar Sentral dan terminal Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai. Adapun jumlah responden yang peneliti teliti pada stasiun terminal Pasar Sentral yaitu 21 responden dan pada stasiun Tellu Limpoe sebanyak 18 responden sehingga total responden yang peneliti teliti sebanyak 39 orang.

Diagram 4.1

Jumlah Responden



Sumber angket pada Tanggal 20 - 23 Desember 2013

Berdasarkan jumlah responden pada kedua stasiun terminal di Kabupaten Sinjai menunjukkan bahwa pengemudi angkutan kota memang tidak mengingkari bahwa terkadang mereka juga memberikan setoran atas pungli yang dilakukan oleh oknum kepolisian dengan berbagai macam alasan

dan dengan jumlah yang tidak tetap tergantung dari jenis pelanggaran mereka lakukan.

Dari hasil angket yang penulis peroleh, kemudian penulis mengadakan sesi wawancara yang bertempat di kantor Dinas Perhubungan (dishub) Kabupaten Sinjai terhadap salah satu pegawai Dishub yaitu pada tanggal 20 Desember 2014 pada pukul 02.00 siang, yang mengungkapkan bahwa selama ini tidak ada satu pun laporan dari masyarakat khususnya pengemudi angkutan kota yang melapor telah dikenai pungli oleh oknum kepolisian karena mungkin saja dengan adanya pungli maka pengemudi angkutan kota juga turut merasakan enaknya dikenai pungli dengan berbagai macam alasan seperti mempermudah urusan (uang pelicin).

2. Jenis Pungutan

Dalam setiap pengoperasian di jalan raya tentunya terdapat berbagai macam pelanggaran baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Berbagai macam jenis pelanggaran yang kerap kali dilakukan oleh pengemudi angkutan kota saat beroperasi khususnya di jalan raya dan dikenakan denda berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan diantaranya yaitu:

Tabel 4.1

Jenis Pelanggaran yang Biasa Dilakukan Oleh Pengemudi Angkutan Kota Berdasarkan Denda Resmi yang Seharusnya Dibayar

NO	JENIS PELANGGARAN	DENDA RESMI
1.	Kelengkapan teknis (spion, lampu utama, dll)	Rp. 250.000
2.	Rambu dan markah	Rp. 500.000
3.	Tidak bisa menunjukkan STNK	Rp. 500.000
4.	Tidak bisa menunjukkan SIM	Rp. 250.000
5.	Tidak memiliki SIM	Rp. 1.000.000
6.	Lampu utama tidak menyala	Rp. 100.000
7.	Mengemudi menggunakan Hp	Rp. 50.000

Berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi angkutan kota, tentunya dapat meresahkan masyarakat seperti halnya pengemudi angkutan kota apabila kendaraan yang mereka tumpangi tidak memiliki kaca spion, seenaknya menerobos lampu merah, lampu weser tidak menyala serta kurangnya konsentrasi saat berkendara tentunya akan membahayakan diri sendiri serta orang lain.

Adapun jumlah pungutan resmi yang di telah diuraikan diatas, maka oknum kepolisian yang beroperasi di tepi jalan raya kerap kali melakukan razia untuk menertibkan setiap pengendara transportasi yang melakukan

pelanggaran demi keselamatan bersama. Olehnya itu bagi setiap pengemudi angkutan kota yang menyalahi aturan yang telah ditetapkan diwajibkan untuk membayar denda berdasarkan jenis pelanggaran yang telah dilakukan.

Namun dengan adanya berbagai macam alasan yang dikemukakan oleh pengemudi angkutan kota agar tidak dikenai tilang, maka setoran yang tidak seharusnya pun menjadi salah satu jalan keluar dengan modus sebagai uang pelicin, takut dipersulit, proses cepat dan mudah, dan sebagai uang keamanan maka uang yang telah diberikan sebelumnya bukannya masuk ke setoran Negara malah masuk ke kantong oknum kepolisian dan berikut jenis dan jumlah pungutan yang kerap diberikan oleh pengemudi angkutan kota yaitu:

Tabel 4.2

Jenis dan Jumlah Pungutan Tidak Resmi yang Diberikan Oleh Pengemudi Angkutan Kota Terhadap Oknum Kepolisian

No	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH RESPONDEN	DENDA RESMI	DENDA YANG DIBERIKAN
1.	Kelengkapan teknis (spion, lampu utama, dll)	6	Rp. 250.000	Rp. 50.000 - Rp. 200.000
2.	Rambu dan markah	4	Rp. 500.00	Rp. 100.000 - Rp. 200.000
3.	Tidak bisa menunjukkan STNK	2	Rp. 500.000	Rp. 150.000 - Rp. 250.000
4.	Tidak bisa menunjukkan SIM	-	Rp. 250.000	-
5.	Tidak memiliki SIM	6	Rp.1.000.000	Rp. 400.000 - Rp. 500.000
6.	Lampu utama tidak menyala	-	Rp. 100.000	-
7.	Mengemudi menggunakan Hp	-	Rp. 50.000	-

Dari 39 keseluruhan jumlah responden yang peneliti teliti terdapat 18 jumlah keseluruhan responden yang melakukan pelanggaran tetapi memberikan bayaran dengan jumlah yang tidak sesuai dengan jumlah denda yang seharusnya maka pungli pun terjadi berdasarkan atas kemauan para pengemudi angkutan kota itu sendiri.

3. Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Pungutan Liar

Berdasarkan hasil angket yang penulis teliti dari 39 jumlah responden antar kedua terminal terdapat berbagai macam faktor yang menyebabkan pungli terjadi. Salah satu diantaranya yaitu banyaknya responden yang melakukan pelanggaran. Berikut jumlah persentase keseluruhan responden antara terminal Pasar Sentral dan terminal Tellu Limpoe.

Diagram 4.2



Berdasarkan keterangan responden antar kedua terminal mengenai banyak jumlah responden yang dikenai pungli karena melakukan pelanggaran yaitu :

1. terdapat 22 orang (65%) yaitu 12 responden di terminal pasar sentral dan 10 responden di terminal tellu limpoe yang mengatakan telah melakukan pelanggaran.
2. Terdapat 10 orang (21%) yaitu 5 responden di terminal pasar sentral dan 5 responden di terminal tellu limpoe yang mengatakan tidak pernah melakukan pelanggaran.
3. Terdapat 7 orang (14%) yaitu 4 responden di terminal pasar sentral dan 3 responden di terminal tellu limpoe yang mengatakan kadang-kadang melakukan pelanggaran.

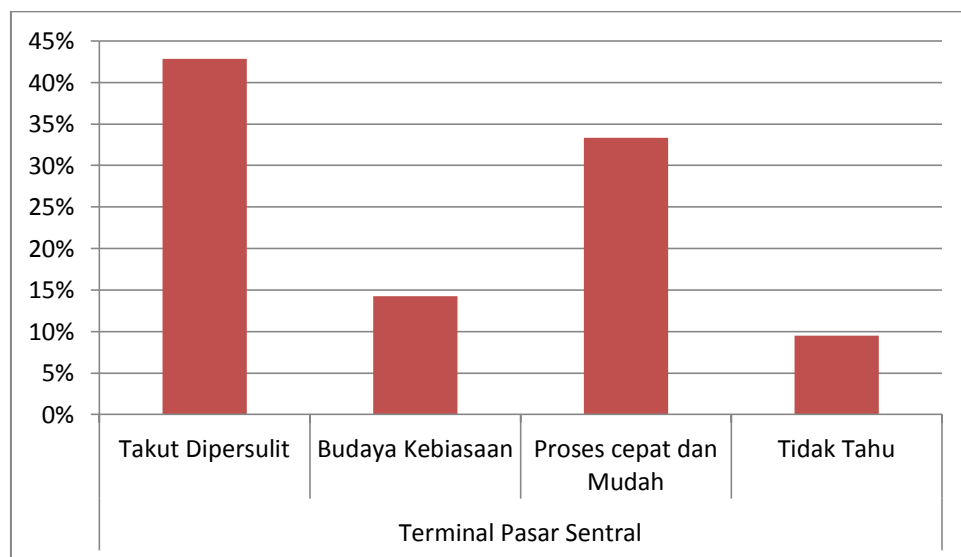
Dari Uraian yang telah penulis paparkan berdasarkan jumlah responden dan hasil angket yang telah diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa pungli kerap kali terjadi karena adanya kesempatan dan lemahnya pengawasan yang menjadi faktor pendorong tumbuh suburnya perilaku pungli dalam proses pelayanan publik, mengapa ? karena masyarakat sendiri kerap menyerahkan sejumlah uang karena ketiadaan lembaga pengawasan yang efektif, masyarakat pun kerap menyumbang kontribusi dengan cara membiasakan memberi uang tanpa mampu bersikap kritis melakukan penolakan pembayaran diluar dari biaya resmi. Budaya memberi masyarakat

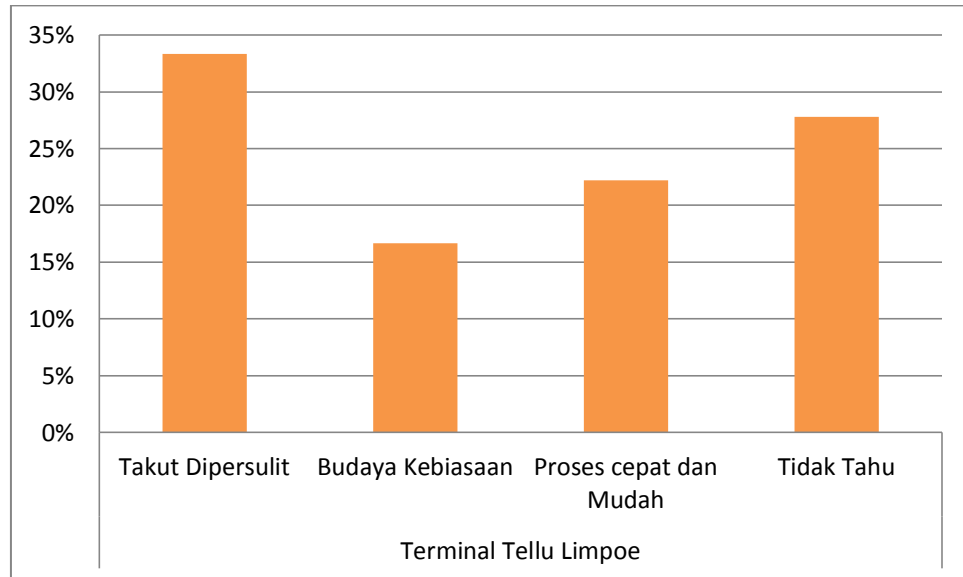
untuk memperlancar urusan dengan birokrat susah untuk dihilangkan karena disisi lain hal ini juga turut dilembagakan oleh masyarakat dengan sengaja ataupun tidak sengaja melakukan pelanggaran.

Adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi angkutan kota tentunya mempunyai alasan tersendiri mengapa kerap kali memberikan uang dengan jumlah yang tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya karena berbagai hal dan berikut mengenai keterangan responden mengenai alasan memberikan pungli.

Diagram 4.3

Alasan Responden Memberikan Pungli





Berdasarkan keterangan responden mengenai alasan memberikan pungutan liar disebabkan karena 4 hal yaitu :

1. Takut dipersulit
2. Budaya kebiasaan.
3. Proses cepat dan mudah.
4. Tidak tahu/ memberikan secara Cuma-Cuma.

Berdasarkan hasil angket yang diperoleh dari 39 jumlah keseluruhan responden yang terdapat pada kedua terminal yaitu :

1. Terdapat 9 (43%) responden di terminal pasar sentral dan 6 (33%) responden beralasan memberikan pungli karena takut dipersulit seperti melakukan pelanggaran

kelengkapan kendaraan tidak lengkap seperti spion mobil tidak ada, lampu utama tidak nyala.

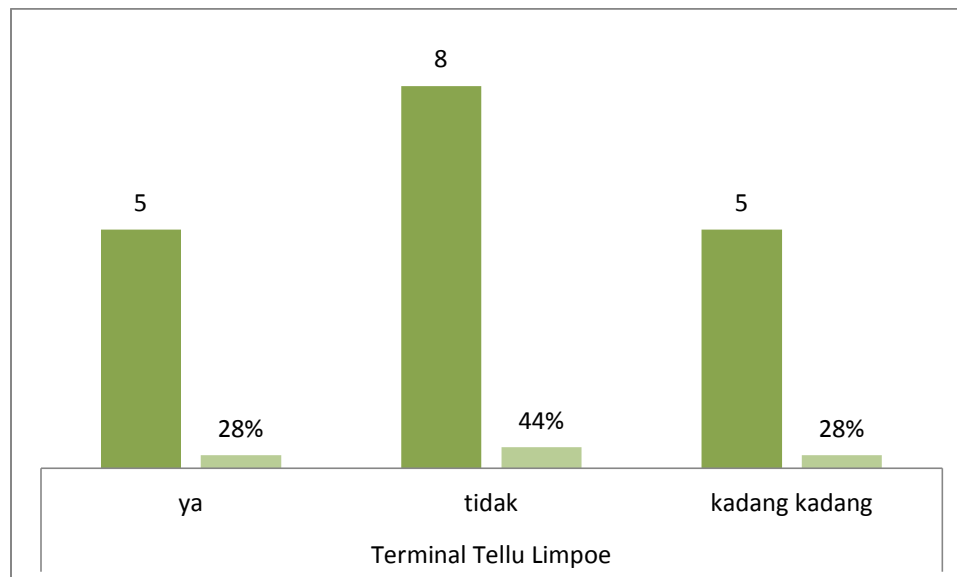
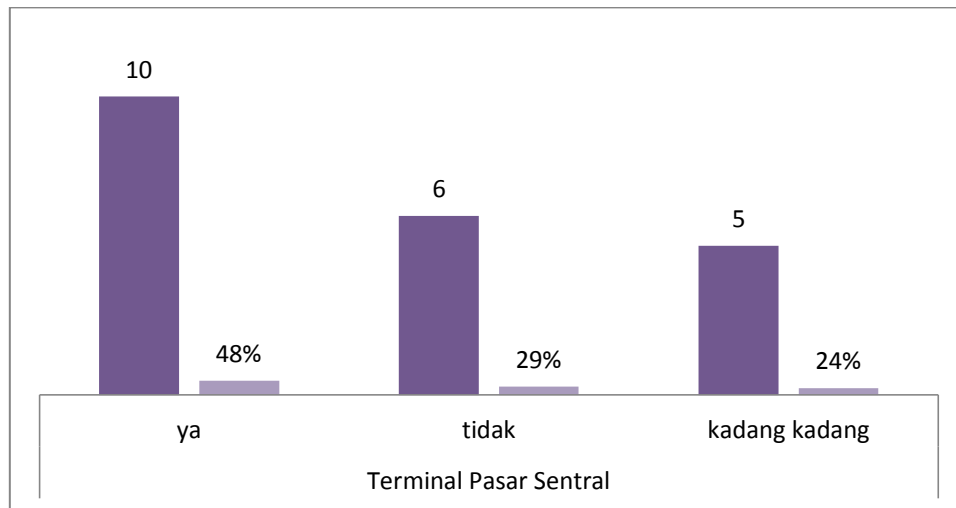
2. Terdapat 3 (14%) responden di pasar sentral dan 3 (17%) responden di terminal tellu limpoe yang mengatakan telah memberikan pungli disebabkan sebagai budaya kebiasaan seperti menggunakan HP saat mengendarai, melewati rambu dan markah untuk mengefisiensikan waktu.
3. Terdapat 7 (33%) responden di terminal pasar sentral dan 4 (22%) responden di terminal tellu limpoe yang mengatakan telah memberikan uang pungli sebagai proses cepat dan mudah seperti tidak memiliki SIM tidak bisa menunjukkan SIM dan STNK (lupa).
4. Terdapat 2 (10%) responden di terminal pasar sentral dan 5 (28%) responden di terminal tellu limpoe yang beralasan hanya memberikan pungli secara cuma-cuma meski kadang tidak melakukan pelanggaran tetapi tetap memberikan pungli yang dianggap sebagai uang keamanan.

Dengan tingginya tingkat ekonomi di masyarakat maka seorang pengemudi angkutan kota yang sebenarnya sama dengan masyarakat lain yang tentunya ingin menaati peraturan yang telah ditetapkan, akan tetapi

untuk memenuhi kebutuhan hidup maka para pengemudi angkutan kota betul-betul harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan anak dan istri. Maka dari itu alasan yang melatar belakangi para pengemudi angkutan kota lebih memilih mengefisiensikan waktu dibanding menaati peraturan hukum yang katanya membutuhkan jangka waktu yang lama dalam proses penyelesaian, maka untuk mengejar setoran perhari para pengemudi angkutan kerap memberikan uang pungli yang katanya tidak begitu membebani dibanding waktu terbuang sia-sia dan jumlah penghasilan semakin tidak mencukupi. Dari 39 jumlah responden yang penulis teliti, ternyata ada beberapa diantaranya yang mengungkapkan bahwa jumlah penghasilan perhari yang di peroleh ternyata ada yang merasa cukup, ada yang tidak, dan ada yang kadang-kadang merasa cukup dan kadang-kadang pula merasa tidak cukup.

DIAGRAM 4.4

Tingkat Kecukupan Penghasilan Pengemudi Angkutan Kota Perhari



Berdasarkan keterangan responden antar kedua terminal mengenai tingkat kecukupan yang mereka peroleh untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam sehari yaitu :

1. Terdapat 10 (48%) responden di terminal pasar sentral dan 5 (28%) responden di terminal tellu limpoe yang mengatakan bahwa jumlah penghasilan yang diperoleh ya (cukup) untuk memenuhi kebutuhan hidup perhari.
2. Terdapat 6 (29%) responden di terminal pasar sentral dan 8 (44%) responden di terminal tellu limpoe yang mengatakan bahwa jumlah penghasilan yang diperoleh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup perhari.
3. Terdapat 5 (24%) responden di terminal pasar sentral dan 5 (28%) responden di terminal tellu limpoe yang mengatakan bahwa jumlah penghasilan yang diperoleh terkadang mencukupi terkadang pula tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup perhari.

Berdasarkan dari hasil angket tersebut diatas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya pungutan liar antara lain :

- a. Faktor ekonomi, berdasarkan keterangan responden mengenai latar belakang oknum kepolisian melakukan pungutan kepada pengemudi angkutan kota yaitu sebagai uang pelicin (uang rokok).
- b. Faktor mental, berdasarkan keterangan responden mengenai latar belakang oknum kepolisian melakukan pungutan kepada

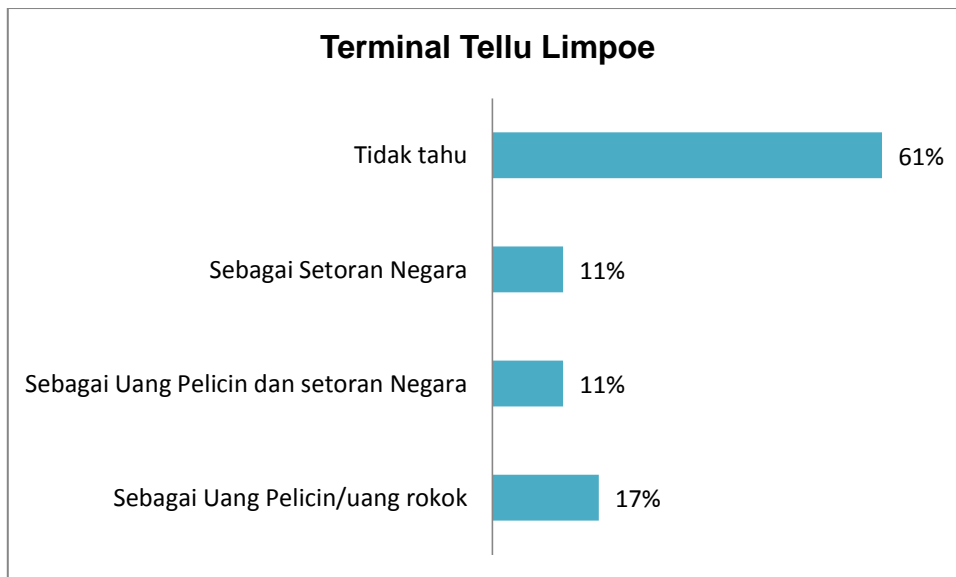
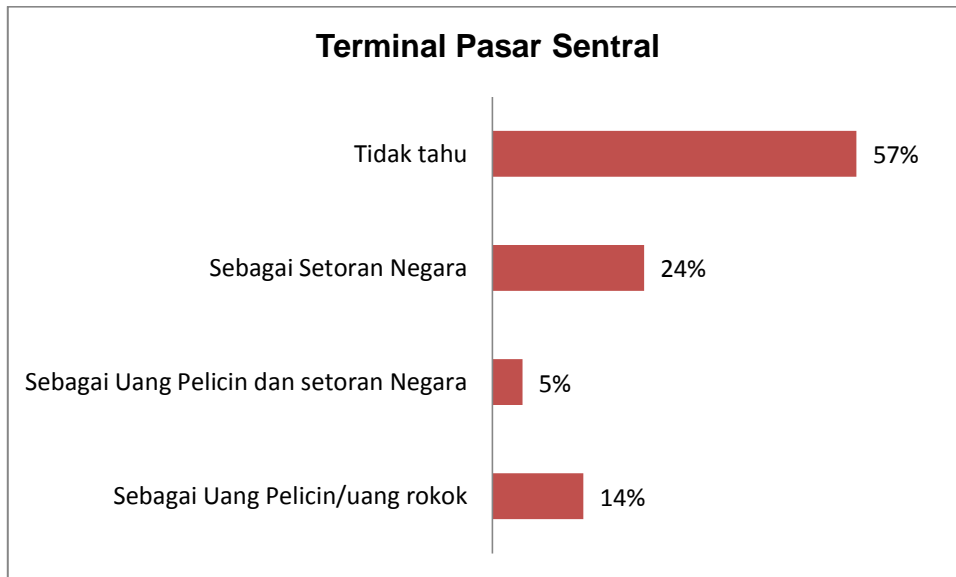
pengemudi angkutan kota yaitu karena pengemudi takut dipersulit, budaya kebiasaan dan proses cepat dan mudah.

- c. Faktor Individu, berdasarkan keterangan responden mengenai latar belakang oknum kepolisian melakukan pungutan kepada pengemudi angkutan kota, disebabkan karena pengemudi angkutan sendirilah yang juga ikut menikmati/ merasakan enaknyanya dikenai pungli karena lebih mengefisiensikan waktu dibandingkan menaati peraturan yang ada apabila melakukan pelanggaran.

Adanya perbuatan yang ikut melembagakan pungli dimasyarakat merupakan suatu perbuatan yang tidak patut dicontoh karena melanggar hukum maka akan berdampak pada generasi penerus yang tentunya tidak akan menjadi generasi yang lebih baik karena mencontoh perbuatan yang tidak pantas. Berikut pendapat para korban terhadap oknum kepolisian mengenai apa saja yang melatar belakangi oknum kepolisian melakukan pungli.

Diagram 4.5

**Pendapat Para Korban Mengenai Alasan yang Melatar
Belakangi Oknum Kepolisian Melakukan Pungli**



Berdasarkan hasil angket yang penulis peroleh mengenai apa saja alasan yang melatar belakangi oknum kepolisian melakukan pungli di kedua terminal yaitu :

1. Terdapat 3 (14%) responden di terminal pasar sentral dan 3 (17%) responden yang mengatakan bahwa alasan oknum kepolisian melakukan pungli yaitu sebagai uang pelicin/ uang rokok.
2. Terdapat 1 (5%) responden di pasar sentral dan 2 (11%) responden di terminal tellu limpoe yang mengatakan bahwa alasan oknum kepolisian melakukan pungli yaitu sebagai setoran Negara.
3. Terdapat 5 (24%) responden di terminal pasar sentral dan 2 (11%) responden di terminal tellu limpoe yang mengatakan bahwa alasan oknum kepolisian melakukan pungli yaitu sebagai uang pelicin dan setoran negara (gabungan).
4. Terdapat 12 (57%) responden terminal pasar sentral dan 11 (61%) responden di terminal tellu limpoe yang mengatakan tidak tahu apa alasan oknum kepolisian melakukan pungli.

Dari Hasil keterangan responden menunjukkan bahwa kepolisian belum sepenuhnya bertugas memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan secara efektif kepada masyarakat.

Pungutan Liar yang dilakukan oleh oknum kepolisian merupakan salah satu bentuk atau jenis tindak pidana korupsi dalam rumusan yang berasal pada pasal 12 huruf e menunjuk pada Pasal 423 dan Pasal 12 huruf f, rumusannya diambil dari Pasal 425 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan dari semua keterangan yang diberikan oleh responden dari hasil pembagian kuisisioner sampai pada hasil wawancara dengan korban, menunjukkan bahwa pemerintah kota Kabupaten Sinjai telah menginstruksikan kepada masyarakat agar menaati segala peraturan yang telah ditetapkan namun dengan perlu kita ketahui bersama bahwa bagaimanapun bentuk peraturan yang telah ditetapkan tidak akan bisa berjalan dengan sangat sempurna, karena kita terlahir dengan berbagai macam karakter yang berbeda-beda.

B. Upaya Penanggulangan Terhadap Pengemudi Angkutan Kota Agar Tidak Lagi Menjadi Korban Pungutan Liar

1. Upaya Penanggulangan Pungutan Liar

Pungutan Liar merupakan suatu tindak pidana yang meresahkan sebahagian masyarakat lainnya sehingga dibutuhkan upaya dalam penanggulangannya, dan untuk meminimalisir agar pengemudi angkutan kota agar tidak lagi menjadi korban pungli maka sanksi pidana tetap

diberlakukan kepada tersangka yang melakukan tindakan pungli dan berikut upaya penanggulangan pungutan liar yaitu :²²¹

1. Upaya Preemtif

- a. Melakukan pembinaan internal mengenai kode etik dan disiplin kepolisian.
- b. Himbauan kepada anggota kepolisian mengenai sanksi hukum apabila melakukan kejahatan.
- c. Arahan dari pimpinan berupa nasehat dan instruksi terhadap anggota kepolisian untuk melakukan kewajiban sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

2. Upaya Preventif

- a. Meningkatkan pengetahuan dan sosialisasi masalah hukum khususnya peraturan yang berkenaan dengan lalu lintas.
- b. Meningkatkan kesadaran hukum untuk membayar tilang sesuai dengan prosedur yang berlaku.

3. Upaya Represif

Bagi oknum kepolisian yang melakukan pungli, akan dikenakan pelanggaran disiplin dan kode etik kepolisian sesuai dengan aturan yang berlaku.

²²¹ <http://jurnaltangerang.com>, diakses pada tanggal 28 Desember 2013, pk. 13.00 wita

Pungutan liar yang terjadi di Kabupaten Sinjai membutuhkan upaya yang efektif meskipun pungutan liar yang terjadi masih belum terlalu parah agar anggota kepolisian mampu membangun pencitraan yang baik dimata masyarakat, sehingga mampu membangun pondasi demi terciptanya lembaga hukum yang lebih baik. Selain dari upaya-upaya tersebut diatas, penulis menyimpulkan beberapa langkah-langkah dan strategi yang harus dilakukan agar oknum kepolisian mampu membangun kinerja yang baik, yaitu:

1. Perlu adanya internalisasi esensi dan nilai yang terkandung dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia khususnya anggota kepolisian. Hal ini perlu ditekankan agar pemahaman yang utuh tentang peran dan fungsi aparat kepolisian benar-benar diresapi dan diimplimentasikan dalam tugas sehari-hari;
2. Perlu penegasan adanya aturan hukum dan penghargaan bagi anggota kepolisian yang berhasil, maupun yang melanggar. Adanya mekanisme tersebut diasumsikan akan merangsang kompetisi yang efektif bagi penyelenggaraan kegiatan dan aktivitas. Di samping itu yang tidak kalah seriusnya adalah adanya fungsi kontrol pimpinan dengan melakukan inspeksi mendadak (Sidak). Hal ini akan mampu membuat efek jera bagi anggota yang melanggar, serta

memberikan dorongan psikologis bagi anggota yang menjalankan tugasnya dengan baik;

3. Oknum kepolisian perlu mempertimbangkan pola pendekatan yang non-konvensional. Hal ini perlu dilakukan agar kinerja oknum/ anggota kepolisian tidak hanya memberikan efek ketakutan kepada pengendara, tapi membangun suatu paradigma bagi masyarakat secara umum tentang pentingnya disiplin berlalu lintas. Hal ini perlu dilakukan agar oknum kepolisian tidak hanya menjadi hantu menakutkan bagi pengendara, tapi menjadi sahabat bagi pengendara dan masyarakat;
4. Membangun kerja sama yang sinergis antara instansi-instansi terkait, seperti Pemerintah Daerah (Pemda), Dinas Perhubungan, dan lain sebagainya. Kerja sama tersebut secara kasat mata baru terjadi di lapangan, seperti pada pembagian kerja, namun belum sampai pada penegasan efektivitas kerja sama. Bahkan terkadang di lapangan justru yang muncul adalah *esprit de corps* yang sempit dari masing-masing instansi, yang makin membangun paradigmatis berlalu lintas yang tidak efektif dan efisien.

2. Upaya yang Harus Dilakukan Oleh Pemerintah Khususnya Pengemudi Angkutan Kota Agar Terlepas Dari Pungli

Kurangnya perhatian dari pemerintah yang menyebabkan adanya praktik pungli di masyarakat khususnya pengemudi angkutan kota sebagai korban yang turut serta melembagakan pungli tentunya diperlukan upaya pemerintah untuk mencegah praktik pungli di masyarakat. Adapun upaya yang harus diterapkan yaitu:

1. Mengadakan Penyederhanaan pengurusan administrasi khususnya kendaraan bermobil dalam hal pengurusan Surat Tanda Kendaraan seperti SIM dan STNK atau surat kelengkapan lainnya, penyederhanaan tersebut dapat berupa pengoptimalan bahkan perubahan system administrasi misalnya dengan penerapan system *Drive thru* untuk pembayaran pajak kendaraan sehingga oknum-oknum yang biasa melakukan pungli tidak lagi memiliki ruang untuk melakukan hal tersebut.
2. Mengadakan pengoptimalan transparansi dan sikap keterbukaan dalam instansi yang menangani administrasi kendaraan roda empat, misalnya dengan pemasangan plat biaya administrasi yang harus di bayar di setiap kantor pelayanan administrasi.
3. Mengadakan sosialisasi kepada pengemudi khususnya pengemudi angkutan kota mengenai pelanggaran-pelanggaran

dalam berlalu lintas, sangsi mekanisme serta besaran sangsi yang harus di bayar, serta bukti pembayaran yang harus di perlihatkan kepada pihak yang berwenang.

4. Menerapkan sangsi tegas kepada oknum yang terbukti melakukan pungli, baik yang di lakukan di bagian pengurusan administrasi maupun pada saat oprasi penertiban.

Selain dari pada itu pengemudi angkutan kota hendaknya bisa membudayakan disiplin berlalu lintas serta melengkapi kelengkapan kendaraan sebelum beroperasi agar terhindar dari pungli.

Terlepas dari baik buruknya implementasi langkah dan strategi yang diambil, maka perlu kita ketahui bersama bahwa suatu perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain tergantung seberapa efektif perilaku yang baik diterapkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan korban sehingga menyebabkan menjadi korban pungli sangat besar apabila ditinjau dari alasan korban untuk menyetor pungli yaitu dengan adanya kebiasaan memberikan pungli (uang pelicin) saat melakukan pelanggaran lalu lintas di jalan raya, adanya rasa takut akan dipersulit oleh oknum kepolisian dan proses yang cepat serta kemudahan pengurusan yang menyebabkan pengemudi angkutan kota seakan tidak lagi memperhatikan aturan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah bahkan pengemudi angkutan kota justru ikut melembagakan pungli tanpa mampu bersikap kritis terhadap penolakan praktik pungli yang dibebankan karena memiliki keuntungan satu sama lain.
2. Upaya penanggulangan pengemudi angkutan kota agar tidak lagi menjadi korban pungli mempunyai peranan yang sangat penting untuk menolak adanya praktik pungli yang kerap kali mereka rasakan apabila terbukti tidak melakukan pelanggaran dan terbukti tidak bersalah serta mampu berpikir kritis dan bersikap tegas dengan melakukan penolakan pembayaran yang dibebankan atau mengadukan hal tersebut kepada pihak yang berwajib apabila

dimintai pungli dengan alasan yang tidak jelas. Adanya praktik pungli tentunya sangat diperlukan pengawasan yang efektif dari lembaga-lembaga terkait agar lebih memperhatikan proses birokrasi dan menanamkan kepada masyarakat khususnya pengemudi angkutan kota mengenai pentingnya budaya disiplin serta membuka jalur pengurusan yang mudah, murah dan cepat.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil pembahasan dan penelitian yang penulis peroleh baik dari segi survei dan wawancara, maka penulis mengemukakan saran yaitu :

1. kiranya peningkatan pengawasan lebih ditingkatkan lagi khususnya dilapangan guna meminimalisir kecurangan-kecurangan yang dapat terjadi. Maka dari itu pungli harus diberantas sampai ke akar-akarnya agar oknum yang terkait tidak lagi berani melakukan pungli atau menyalahi segala jenis peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Masyarakat ataupun oknum yang terkait agar kiranya mampu menyadari bahwa pentingnya menaati ketaatan akan kesadaran hukum demi tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang jauh lebih baik karena sebaik apapun konsep, teori, maupun peraturan jika tidak ditindak lanjuti maka tidak akan ada suatu keadilan dimasyarakat apabila kejahatan belum diberantas terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Arif, Gosita 2004. ***Masalah Korban Kejahatan***. Jakarta: PT.Buana Ilmu Populer.

Kelana, Momo, 1994. ***Hukum Kepolisian***, Jakarta: Gramedia Widayarsana.

J.E Sahetapy. 1995, ***Bunga Rampai Viktimisasi***, Bandung: Eresco.

Lilik, Mulyadi. 2003. ***Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Victimologi***. Denpasar: Djambatan.

Muhadar. 2006. ***Viktimisasi Kejahatan Pertanahan***, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

Soedjono, Dirjosisworo. 1984. ***Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia***. Bandung: Sinar Baru.

----- 1989. ***Masalah Perlindungan Anak***, Jakarta: CV. Akademika Presindo, Edisi Pertama-Cetakan Kedua.

Simanjuntak, 1981, ***Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial***, Bandung: Tarsito.

Wede, Made Darma, 1995, ***Beberapa Catatan Tentang Korban Kejahatan Korporasi, dalam Bunga Rampai Viktimisasi***, Eresco, Bandung.

Makalah, Artikel, Majalah

BPKP 2002, ***Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat***.

Makalah Chaerudin dan Syarif Fadillah, Makassar 2001 ***Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam***.

Kpk., Jakarta 2006, ***Memahami Untuk membasmi***.

Makalah gatot sugiharto, Jogjakarta 2008, ***viktimologi yang ada di Indonesia.***

Makalah Srye Mulyani , Jakarta 2009 . ***Permasalahan yang mengarah pada tindak pidana.***

Makalah Lina sirajud Bandung 2003 ***Hukum An Introducing to victimology.***

Makalah Pyandri Jakarta 2012., ***Pungutan Liar Terorganisasi .***

Muladi, Bandung 2003 ***Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat.***

Peraturan Perundang-undang

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang ***Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.***

Internet

<http://shecyndi.blogspot.com/2012/03/victimology.html>, diakses pada tanggal 11 September 2013 pkl. 15.00 wita.

<http://lawofpardomuan.blogspot.com/2011/12/viktimologi.html>, diakses pada tanggal 12 September 2013 pkl 13.00 wita.

<http://jantukanakbetawi.wordpress.com/2010/12/28/makalahviktimologi>, diakses pada tanggal 15 September 2013, pkl. 16.00.